

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka adanya suatu konsep yang disebut otonomi daerah, yaitu kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan dan masyarakat yang baik, sejahtera, dan adil. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan pusat dengan daerah terutama mengenai keuangan harus komprehensif dan responsif terhadap tuntutan kemandirian dan perkembangan daerah. Dengan adanya keterkaitan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka adanya Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan daerah masih belum optimal dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, hal ini sangat merugikan masyarakat yang sebenarnya menikmati kesejahteraan dari pembangunan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah menjadi menjadi faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dikatikan

dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di daerah. Kinerja tersebut dapat dilihat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dalam pelaksanaan dan penerapannya serta bagaimana sistem pertanggungjawaban dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah ini. Kedudukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat penting karena merupakan tolok ukur keberhasilan dan keseriusan suatu daerah dalam mengembangkan kesejahteraan dan potensi yang ada di daerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi suatu daerah karena suatu daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance* dengan melakukan tata kelola yang baik, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Dewasa ini, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, handal, dan responsive semakin besar, termasuk dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK - RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kota Kupang Tahun 2017 menunjukkan opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menyatakan bahwa LKPD Kota Kupang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai SAP, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Kota Kupang belum memperoleh opini yang tertinggi sesuai ketentuan BPK-RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena belum memperoleh opini yang tertinggi sesuai dengan ketentuan BPK – RI, maka Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dinilai belum berhasil.

(Sumber: *Kupang.bpk.go.id*)

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah, Menurut Afianti (2011), Indriasari dan Nahartyo (2008), mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah antara lain faktor kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya banyak faktor tersebut, penulis membatasi cakupan analisis pada faktor kapasitas sumber daya manusia. Simanjuntak (2005) menyatakan Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Akutansi pemerintahan (SAP) adalah manusia. Maka dibutuhkan dukungan Sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sebagai faktor penting yang

menentukan keberhasilan penerapan pengelolaan keuangan daerah kota kupang. Karena itu Pemerintah Daerah harus memperhatikan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat mengelola keuangan daerah dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengelola keuangan, potensi kekurangan daerah, dan ketidakefektifan serta ketidakefisienan laporan keuangan.

. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik mengkajinya secara mendalam melalui penelitian dengan judul: **“Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah kota kupang ?
2. Bagaimana kapasitas sumber daya manusia pada pemerintah daerah kota kupang?
3. Apakah ada hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dengan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota kupang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dicapai hasil seperti apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah di kota Kupang.
- 2) Untuk mengetahui kapasitas sumber daya manusia pada pemerintah daerah kota kupang.
- 3) Untuk mengetahui hubungan kapasitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota kupang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan – tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai refrensi tentang bahan informasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan kapasitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan sumbangan pikiran bagi pihak yang berkepentingan serta menambah literature perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

